

Wako Minta IDI Saingi Luar Negeri

Tarik WNA Berobat ke Kepri

BATAM (BP) - Wali Kota (Wako) Batam Muhammad Rudi menantang dokter yang tergabung dalam organisasi profesi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kepri memberikan pelayanan yang maksimal. Sehingga, warga Kepri tak perlu lagi berobat ke luar negeri.

"Saya terus terang, termasuk orang yang sakit hati mendengar ada warga Kepri yang berobat ke luar negeri," ujarnya pada *Annual Scientific Meeting 2018* yang digelar IDI Kepri di Swiss-Belhotel Batuampar, Kamis (12/4).

Dari segi uang, kata Rudi, berapa banyak mereka belanjakan jika berobat ke luar negeri. "Coba IDI ciptakan pelayanan yang bisa menghadang warga Kepri sehingga tak perlu berobat ke negara tetangga," ujar Rudi.

Jika peralatan yang menjadi kendala, lanjutnya, pemerintah siap mendukung. "Ini yang saya tunggu-tunggu. Karena visi saya menjadikan Batam Kota Pariwisata. Kalau wisatawan mancanegara mencapai tiga juta orang ke Batam, kalau mereka bawa uang Rp 5 juta, uang beredar di Kepri



F. ANWAR SALEH/ BATAM POS

Rp 15 triliun," kata Rudi.

Ketua IDI Kepri dr Rusdani, MKKK mengatakan, IDI akan menyiapkan sumber daya manusia (SDM) dan memberikan pelatihan meningkatkan profesional pada dokter. Akan tetapi, pemerintah perlu memberikan dukungan agar pelayanan kesehatan rumah sakit di Kepri meningkat.

Salah satu wujud peningkatan kualitas profesi dokter tersebut melalui *annual scientific meeting* yaitu agenda tahunan pertemuan dokter membahas perkembangan

ilmu pengetahuan terbaru di bidang kesehatan. Tantangan Wako Batam tersebut, sesuai tema yakni; meningkatkan layanan medik yang profesional menuju *universal health coverage 2018*.

Pertemuan tahunan dokter tersebut, kata dr Rusdani, transfer ilmu pengetahuan kepada dokter. Narasumber diambil dari luar Kepri, sehingga benar-benar bisa menambah wawasan baru bagi dokter.

Hal tersebut juga diutarakan Ketua Pengurus Besar (PB)

KETUA PB IDI Pusat Prof dr Ilham Oetama Marsis, SpOG(K) didampingi Wako Batam Muhammad Rudi dan Ketua IDI Kepri dr Rusdani MKK, memukul gong membuka *Annual Scientific Meeting 2018* yang digelar IDI Kepri di Swiss-Belhotel Batuampar, Kamis (12/4).

IDI Pusat Prof dr Ilham Oetama Marsis, SpOG(K) bahwa dalam Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) bahwa salah satu poinnya adalah pariwisata kesehatan.

"Tantangan Pak Wako tersebut harus diterima. Apalagi Kepri dari segi wilayah berbatasan dengan negara tetangga, rumah sakit di Kepri harus bisa memberikan pelayanan yang bisa menyedot wisatawan berobat ke Kepri. Saya minta IDI Kepri serius menindaklanjuti ini," pesan Ilham. (ash/adv)

Dam Tembesi Bisa Jebol

Tambang Pasir Ilegal Makin Menggila

RIFKY SETIAWAN L-YULITAVIA,
Sagulung

DEPUTI IV Badan Pengusahaan (BP) Batam Eko Budi Soepriyanto akan segera membentuk tim untuk menindak kegiatan tambang pasir ilegal di sekitar Dam Tembesi. Pasalnya, kegiatan tersebut dikhawatirkan dapat membuat dam tersebut jebol.

"Kita akan segera bahu membahu dengan aparat keamanan lain. Nanti bisa rusak *catchment area* dan bisa jebol dam itu," kata Eko, Kamis (12/4).

Pihaknya sudah berulang kali menertibkan. Tapi setelah penertiban, kegiatan tambang pasir ilegal kembali berjalan normal seperti biasanya. "Beberapa hari lalu juga ada pen-

ertiban, besoknya malah muncul-muncul lagi. Kami memang tak boleh lengah," ucapnya.

Penambangan pasir ilegal dapat merusak area tangkapan air di sekitar dam. Hal tersebut sangat mengkhawatirkan karena dam tersebut merupakan salah satu penopang utama ketersediaan air baku bagi masyarakat Batam. "BP sendiri punya satuan untuk mengamankan itu. Ini sudah menjadi konsentrasi pimpinan BP untuk menanganinya," paparnya.

Menurut Eko, penambangan pasir benar-benar merugikan lingkungan. "Mereka tak berpikir ke arah kerusakan lingkungan, karena yang penting bisa dapat keuntungan saja dari itu," jelasnya.

Terkait adanya mesin-mesin penambang pasir yang tak kunjung diangkut Direktorat Pengamanan (Ditpam) BP Batam, ia enggan berkomentar. "Saya terima kasih atas masukan dari teman-teman. Mesinnya ya oke-oke," ujarnya. Permasalahan tambang pasir ilegal ini memang sudah lama menjadi kontroversi. Namun, tak kunjung dibenahi baik oleh pemerintah daerah maupun BP Batam.

Anggota Komisi I DPRD Provinsi Kepri Ruslan Kasbulatov mengatakan tidak ada sama sekali upaya hukum dari pihak terkait untuk mengatasi masalah ini.

"Ada apa dengan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Pemprov Kepri dan BP Batam.

Tak mungkin mereka tak tahu. Pasti ada permainan," ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa Dam Tembesi merupakan area tangkapan air yang dibutuhkan untuk menjaga ketahanan air bersih di Batam. Pengelolannya, BP Batam, harus bisa menjaganya dengan sebaik-baiknya. "Jika bicara investasi, maka harus ada ketersediaan air. Jangan yang ini malah dibiarkan terus," paparnya.

Saling Lempar Tanggung Jawab

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam Herman Rozi kembali mengatakan bahwa pihaknya tetap tak mau menindak meski tahu ada kerusakan lingkungan di kawasan tambang pasir ilegal. Pasalnya, kata dia, penindakan tambang pasir merupakan

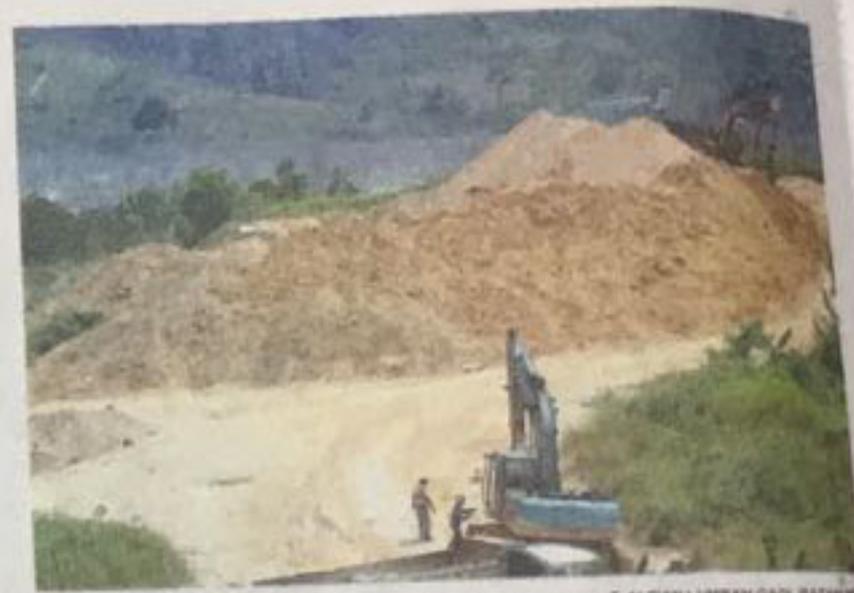
kewenangan Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Provinsi Kepri.

"Lingkungan itu rusak karena tambang pasir," sebut dia, Kamis (12/4).

Ia menjelaskan, ilegal ataupun memiliki izin, aktivitas pertambangan tetap jadi tanggung jawab provinsi. Karena itu, pihaknya tidak mau melangkahi kewenangan di tingkat provinsi tersebut. "Nanti kami kerjakan, salah pula," ucapnya.

Tidak hanya itu, untuk menertibkan tambang pasir ilegal pasti membutuhkan anggaran. Karena kewenangan bukan di tingkat Pemerintah Kota (Pemko) Batam, maka pihaknya juga tidak menyiapkan anggaran untuk hal ini.

"Kami sudah menyurati mereka (Distamben), namun mereka minta kami yang turun, sedangkan itu tanggung jaw-



TAMBAK pasir ilegal beroperasi di dekat Dam Tembesi, Sagulung, belum lama ini. Aktivitas itu dikhawatirkan bisa membuat dinding dam tersebut jebol.

ab mereka," tegasnya.

Mantan camat Lubukbaja ini membuka diri jika pihak provinsi ingin bersama-sama turun dan menertibkan tambang pasir ini. Karena sebagai daerah yang terdampak langsung, pihaknya ingin hal ini bisa terselesaikan dengan cepat.

"Agar tingkat kerusakan tidak meluas, jadi harus dihentikan. Sebenarnya tidak ada masalah

jika semua pihak bersatu pasti tertib semua tambang pasir ilegal ini," paparnya.

Menurut Herman, Kementerian Lingkungan Hidup juga telah menegaskan itu merupakan kewenangan provinsi. "Jangan karena tak berizin, mereka tak mau tertibkan. Inikan permasalahan tambang, dan itu di mereka (provinsi, red)," tambahnya. ***

Tertibkan 18 Bangunan

Oknum Satpol PP Terancam Dipecat

SEKUPANG (BP) - Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad menyayangkan tindakan Wan Nur Dafi, oknum aparatur sipil negara (ASN) dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Batam yang terlibat pembobolan mobil di beberapa tempat di Batam.

"Mencoreng citra pegawai di lingkungan Pemko Batam," kata Amsakar usai menghadiri peresmian kantor Dewan Pendidikan Batam di Sekupang, Kamis (12/4).

Wan saat ini berstatus sebagai ASN atau Pegawai Negeri Sipil (PNS). Meski begitu, Amsakar menyerahkan kasus ini kepada

pihak berwajib agar diproses sesuai hukum yang berlaku.

Terkait aksi kriminal Wan, Amsakar mengatakan bahwa hal itu akan berpengaruh terhadap posisinya sebagai ASN. Menurut dia, setelah penetapan dari kepolisian hingga putusan hakim, Pemko Batam juga an-

cang-ancang untuk mengambil langkah tegas.

"Sanksi berupa pemberhentian jika dia memang terbukti melakukan pencurian tersebut. Kami tunggu dulu proses hukumnya," ujarnya.

Akan Dites Urine
Polisi juga akan melakukan

tes urine terhadap Wan untuk memastikan apakah dia menggunakan narkoba atau tidak.

"Tes urine belum kita lakukan. Tapi dalam waktu dekat ini pasti akan kita cek urinenya," ujar Waka Sat Reskrim Polresta Bareleng AKP Andri Kurniawan, Kamis (12/4) sore. (yui/gie)

Wali Kota Resmikan Kantor Dewan...

Sambungan dari hal 9

kepada anak-anak Batam yang ingin melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi.

"Kita memberikan beasiswa kepada anak-anak lulusan SMA yang merupakan mahasiswa undangan di lima universitas terkemuka di Indonesia. Mereka kita siapkan untuk memimpin Batam pada 15 atau 20 tahun ke depan," ungkapnya.

Ketua Dewan Pendidikan Kota Batam Sudirman Dianto menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada wali kota dan wakil wali Kota Batam yang bersedia hadir meresmikan kantor Dewan Pendidikan. Anggota Dewan Pendidikan Batam berjumlah 11 orang dan akan menjabat dari tahun 2016-2021 mendatang.

Sudirman menegaskan bahwa Dewan Pendidikan intens berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan (Disdik) dan stakeholder terkait untuk meningkatkan mutu pendidikan. Selain itu juga aktif melakukan pengarahannya dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan.

"Anggota Dewan Pendidikan memiliki komitmen yang tinggi untuk memajukan dunia pendidikan Batam. Gedung yang merupakan pinjaman dari Dinas Pendidikan ini bisa kami gunakan untuk menampung aspirasi masyarakat hingga guru" jelas Sudirman.

Anggota DPD RI dari dapil Kepri Hardi Selamat Hood mengatakan, pinjam pakai aset ini merupakan komitmen dari wali kota dan wakil wali Kota Batam untuk bermitra dengan Dewan Pendidikan. Hardi berharap program Siap Aktif Bantu Sekolah (SABAS) yang dulu pernah diterapkannya dapat dihidupkan kembali. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk mendukung pendidikan di Kota Batam. Dalam kesempatan itu Hardi menyerahkan sertifikat SABAS

yang ditandatangani oleh Menteri Pendidikan.

Peresmian kantor baru Dewan Pendidikan Kota Batam ditandai dengan pemotongan pita oleh Wali Kota Batam Muhammad Rudi didampingi Wakil Wali Kota Amsakar Achmad. Turut hadir dalam acara peresmian itu, selain Hardi Selamat Hood, juga hadir Ketua PGRI Kota Batam Rustam Effendi dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemko Batam. (yui)

Solahart
HOT WATER FROM THE SUN

**ORANG CERDAS
PILIH YANG JELAS BERKUALITAS**

1983-2015
1990-Sekarang
2000-Sekarang

Kunjungi Kami
di REI EXPO BATAM
10 April S/D 22 April 2018
@Mega Mall Centre
**RAIH HADIAH MENARIK !
SELAMA PAMERAN BERLANGSUNG**

MAKMUR SIGNATUR GRANITINDO
Jl. Walakaka Industrial Park Block C No. 1,
Simpang Frangky Batam Center, Batam
Tlp : 0778 465 999
Fax : 0778 467599

Authorised Solahart Dealer

20.991 Anak Terancam Tak Sekolah

PPDB 2018 Pakai Sistem Zonasi

YULITAVIA, Sekupang

DINAS Pendidikan (Disdik) Kota Batam mulai menerapkan sistem zonasi dalam Pendaftaran

Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2018/2019. Sistem zonasi ini sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 17 Tahun 2017 tentang

PPDB. Berdasarkan data Disdik Kota Batam, tahun ini ada sekitar 17.614 anak usia

■ Baca 20.991...Hal 13



WALI Kota Batam Muhammad Rudi dan Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad meresmikan Kantor Dewan Pendidikan Kota Batam di Sekupang, Kamis (12/4).

F. HUMAS PEMKO BATAM UNTUK BATAM POS

Wali Kota Resmikan Kantor Dewan Pendidikan

SEKUPANG (BP) - Wali Kota Batam Muhammad Rudi meresmikan kantor baru Dewan Pendidikan Kota Batam di Jalan Ir Sutami, Kecamatan Sekupang, Kamis (12/4). Dalam sambutannya, Rudi menyampaikan bahwa pendidikan di Batam harus lebih baik dari sebelumnya.

membantu Pemerintah Kota (Pemko) Batam dalam membenahi pendidikan. Rudi sepakat jika pendidikan merupakan salah satu yang terpenting. "Kalau SDM (sumber daya manusia) bagus pasti bisa membawa Batam lebih maju," sebutnya.

"Saya ingin suatu saat pendidikan di Batam dikenal daerah lain," ujarnya. Kepengurusan Dewan Pendidikan Kota Batam yang baru ini diharapkan bisa

Rudi menuturkan, Kota Batam harus memiliki keunggulan baik di sektor pendidikan maupun sektor kesehatan. Pemko, kata dia, memberikan dukungan

■ Baca WALI...Hal 13

KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH BATAM BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

JADWAL SAMSAT KELILING				
TANGGAL	LOKASI SAMSAT	WAKTU PELAYANAN	KETERANGAN LAINNYA	
02 APR - 07 APR 2018	KELPA MALL	TOP 100 BUNYONG	08.00 - 12.00 WIB 13.00 - 17.00 WIB	01 APR 2018 - MINGGU
08 APR - 13 APR 2018	MEL SURABAYA	TIDAK CENTER	08.00 - 12.00 WIB 13.00 - 17.00 WIB	08 APR 2018 - SABTU 14 APR 2018 - SELASA
15 APR - 21 APR 2018	SIKAPATI HILL	SIKAPATI BUNYONG	08.00 - 12.00 WIB 13.00 - 17.00 WIB	15 APR 2018 - MINGGU
22 APR - 28 APR 2018	HOTEL VINDIA	SIKAPATI	08.00 - 12.00 WIB 13.00 - 17.00 WIB	22 & 28 APR 2018 - MINGGU

JADWAL SAMSAT BERGERAK				
TANGGAL	NAMA KECAMATAN	WAKTU PELAYANAN	KETERANGAN LAINNYA	
02 APR - 07 APR 2018	SEKUPANG	08.00 - 12.00 WIB 13.00 - 17.00 WIB	01 APR 2018 - MINGGU	
08 APR - 13 APR 2018	BENKONG	08.00 - 12.00 WIB 13.00 - 17.00 WIB	08 APR 2018 - MINGGU 14 APR 2018 - SELASA	
15 APR - 21 APR 2018	SEI. BEDUK	08.00 - 12.00 WIB 13.00 - 17.00 WIB	15 APR 2018 - MINGGU	
22 APR - 28 APR 2018	NONGSA	08.00 - 12.00 WIB 13.00 - 17.00 WIB	22 & 28 APR 2018 - MINGGU	

JADWAL SAMSAT ANTAR PULAU				
TANGGAL	SAMPAI ANTAR PULAU	WAKTU PELAYANAN	KETERANGAN LAINNYA	
02 APR - 07 APR 2018	RELAKANG PADANG	08.00 - 14.00 WIB	01 APR 2018 - MINGGU	
08 APR - 13 APR 2018	KAJANTAN SELINDANG (TANGUNG SARI)	08.00 - 12.00 WIB	08 APR 2018 - MINGGU	

PT. UNION JAYA SEJATI

SALES - RENTAL - SERVICE - SPAREPARTS: Generator sets, Air Compressor, Forklift, Diesel Welding Machines, Multi Operator Welding Machines, Babyroller, Bar Bender, Bar Cutter, Hammer Drill, Electro Motor, Dynamo, Radiator, Cooler, Air, Hardware, Etc.

PERGUDANGAN KARTIKA BLOK B NO.6 (BELAKANG RUSUN LANCANG KUNING) BATU AMPAR - BATAM ☎ 422 498
0811 7710 992, 0811 7700 797

Good Service & Best Quality Make The Difference

GENERATOR SETS

AIR COMPRESSOR

DIESEL WELDING MACHINES

FORKLIFT

AIR COMPRESSOR

BABYROLLER

BAR BENDER

BAR CUTTER

ELECTRO MOTOR

INVERTER WELDING MACHINE

WELDING MACHINE MILLER

MULTI OPERATOR WELDING MACHINE

E-mail : union_js@yahoo.co.id Website : www.uj.co.id

20.991 Anak Terancam Tak Sekolah

Sambungan dari hal 9

sekolah yang tidak dapat tertampung. Baik di sekolah dasar (SD) negeri maupun SD swasta. Sedangkan yang akan melanjutkan ke tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) ada sekitar 3.377 anak juga bakal tak tertampung di SMP negeri maupun swasta.

Artinya, berdasarkan data tersebut, terdapat 20.991 anak yang terancam tidak bisa masuk sekolah pada PPDB yang dibuka Juni mendatang.

Sekretaris Disdik Kota Batam Hendri Arulan menyebutkan jumlah anak usia sekolah mencapai 43.822 anak. Terdiri dari 19.875 anak tamatan Taman Kanak-Kanak (TK) dan 23.947 anak usia enam tahun ke atas. Sementara daya tampung SD negeri hanya 14.788 anak dengan estimasi 40 anak per kelas, lalu SD swasta bisa menampung 13.001 anak.

Maka, dengan demikian terdapat 17.614 anak yang tidak bisa tertampung baik di SD negeri maupun swasta. "Ini jika zonasi diterapkan dengan estimasi jumlah murid 28 anak per kelas di setiap sekolah swasta," kata Hendri usai menghadiri peresmian kantor Dewan Pendidikan Kota Batam di Sekupang, Kamis (12/4).

Sementara itu, lulusan SD yang akan melanjutkan ke jenjang SMP mencapai 20.741 siswa. Sementara daya tampung SMP Negeri hanya 9.636 kursi dan SMP swasta 8.375 anak. Jumlah tersebut didapatkan dengan estimasi siswa 32 hingga 40 siswa per kelas. Jadi yang tidak tertampung di SMP negeri maupun swasta yang tersebar di 12 kecamatan sebanyak 3.377 siswa.

Namun, sambungnya, karena zonasi di beberapa sekolah ada yang masih kekurangan siswa, seperti Sekupang kurang 68 siswa, maka data jumlah anak yang tak tertampung ini masih bisa turun. "Data ini baru pemetaan sementara, belum fix, nanti akan kami susun kembali. Jadi angka ini bisa saja berubah saat PPDB berlangsung," ujarnya.

Hendri menuturkan, sistem berbasis zonasi pada PPDB tahun ajaran 2018/2019 ini merupakan solusi bagi calon siswa untuk bersekolah yang

tidak jauh dari tempat tinggal mereka. "Jadi, tak ada lagi anak Batuaji yang bersekolah di SMPN 3 di Sekupang," ujarnya.

Menurutnya, sistem zonasi ini menjadi solusi dari permasalahan yang sering muncul saat PPDB. Banyak orangtua yang mengeluhkan karena anaknya tidak bisa mendapatkan kursi di sekolah yang ada di lingkungan mereka.

Hendri menjelaskan bahwa dalam pengaturan zonasi ini, pihaknya akan berkoordinasi dengan lurah hingga camat. Karena ada SDN terletak di satu kelurahan. "Jadi, numpuk gitu. Solusinya mungkin kami akan perpanjang jarak zonasinya. Ada juga yang beberapa sekolah yang berada di perbatasan wilayah seperti SMPN 47 di Basecamp Batuaji," bebernya.

Wakil Wali Kota Batam Am-sakar Achmad mengungkapkan, sistem zonasi ini lebih memfokuskan kepada calon peserta didik yang berada di sekitar sekolah. "Ini artinya anak-anak yang berada di dekat

sekolah berpotensi untuk mendapatkan kursi di sekolah terdekat dari rumah mereka," ujarnya.

Menurutnya, penerapan zonasi bisa menjawab keterbatasan ruang kelas yang selalu terjadi setiap PPDB berlangsung. "Selama ini banyak keluhan soal anak mereka yang harus terlempar ke sekolah yang jauh dari rumah mereka. Mudah-mudahan sistem zonasi ini bisa mengatasi persoalan PPDB," terangnya.

SKB Mulai Dibangun

Sementara itu, Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Batam akan membangun dua sekolah baru (SKB) tahun ini. Lokasinya di Kecamatan Sekupang dengan total anggaran Rp 9 miliar.

Kepala Bidang Pendidikan Menengah Pertama (SMP) Disdik Kota Batam Hernowo menyebutkan, saat ini rencana pembangunan sekolah sudah masuk tahap lelang. "Mei nanti sudah mulai pengerjaan fisik," kata dia, Rabu (11/4) lalu. Ia menerangkan, SKB itu

diperkirakan selesai Oktober mendatang. Tahap pertama sekolah dibangun sebanyak 12 ruang kelas, ruang guru terlebih dahulu. "Maksimalnya nanti akan ada 33 ruang kelas. Nanti akan dilanjutkan tahun berikutnya," jelasnya.

Hernowo menyebutkan dua gedung sekolah yang akan dibangun tersebut, yakni untuk SMP Negeri 57 di Kelurahan Patam Lestari. Lahan seluas satu hektare tersebut akan menjadi sekolah dan mulai ditempati paling lambat Januari 2019.

"Satu lagi yang di Tiban Lama, SMP Negeri 56. Kedua sekolah ini masih menumpang ke sekolah lain. Ini menjadi prioritas tahun ini," katanya.

Saat ini sekolah yang masih menumpang untuk tingkat SMPN hanya dua sekolah tersebut. Jika dua SKB ini rampung, maka tak ada lagi SMPN di Batam yang tidak punya bangunan. "Tinggal nanti melanjutkan tahap pembangunan dengan penambahan RKB (ruang kelas baru)," terangnya.***

REKAPITULASI PPDB SETIAP KECAMATAN

TINGKAT SMP

(Estimasi 32-40 Siswa per Kelas)

No	Kecamatan	Tamatan SD	Daya Tampung SMP Negeri	Daya Tampung SMP Swasta	Jumlah Tak Tertampung
1	Belakangpadang	382	352	0	30
2	Sekupang	2.172	1.480	760	0
3	Bengkong	2.115	480	1.160	475
4	Batamkota	3.536	1.920	1.632	0
5	Batuampar	800	352	943	0
6	Lubuk Baja	1.436	240	1.120	76
7	Nongsa	1.458	800	520	138
8	Sagulung	3.886	1.920	840	1.126
9	Batuaji	2.647	840	920	887
10	Bulang	227	227	0	-
11	Galang	385	385	0	-
12	Seibeduk	1.697	640	480	557
	Jumlah	20.741	9.363	8.375	3.377

TINGKAT SD

(Estimasi SDN 40 Siswa dan SDS 28 Siswa per Kelas)

No	Kecamatan	Jumlah Anak Usia Sekolah	Daya Tampung SD Negeri	Daya Tampung SD Swasta	Jumlah Tak Tertampung
				1.088	866
1	Lubukbaja	2.954	1.000	3.863	3.637
2	Batamkota	8.846	1.346	755	66
3	Nongsa	2.253	1.432	803	1.960
4	Bengkong	4.163	1.400	620	888
5	Batuampar	2.108	600	582	1.304
6	Seibeduk	2.926	1.040	1.885	3.041
7	Sagulung	8.166	3.240	2.465	2.228
8	Batuaji	5.333	1.160	840	3.103
9	Sekupang	5.463	1.520	25	(8)
10	Belakangpadang	657	640	25	51
11	Bulang	516	440	50	(573)
12	Galang	437	960	13.001	17.614
	Jumlah	48.822	14.778		

KETERANGAN: ANGKA DALAM KURUNG MASIH KEKURANGAN SISWA

SUASANA bongkar muat di Pelabuhan Batuampar, Batam, beberapa waktu lalu. Pengusaha mengeluhkan mahalnya tarif kontainer Batam-Singapura dan sebaliknya. Tarif mahal ini menurunkan daya saing investasi di Batam.

Tercekik Tarif Kontainer

Pengusaha Mengeluh, Daya Saing Batam Jadi Menurun

BATAM (BP) - Sejumlah pengusaha meminta pemerintah serius menyelesaikan persoalan yang dinilai menghambat kegiatan usaha dan investasi di Batam. Di antaranya soal tarif angkutan kontainer yang jauh lebih mahal dibandingkan daerah dan negara lain.

Presiden Direktur Panbil Group Johannes Kennedy mengatakan, ongkos kontainer dari dan ke Batam sangat mahal dan tidak kompetitif. Padahal, kata dia, tarif kontainer ini menjadi salah satu pertimbangan investor untuk menanamkan modalnya di Batam.

"Pengusaha itu berharap tarif yang murah dan cepat. Kalau tidak, daya saing kita akan tetap ketinggalan," kata Johannes dalam Rapim Kadin di Hotel Best Western Panbil, Kamis (12/4).

Selain tarif kontainer, Johannes juga menyoroti kapasitas dan fasilitas Bandara Internasional

Hang Nadim. Menurut dia, kualitas dan kapasitas bandara tersebut sudah jauh tertinggal dibandingkan dengan bandara lain di Sumatera.

"Bandara kita sudah kalah bersaing. Ini harus dibenahi secepatnya," katanya.

Kemudian, lanjut Johannes,

untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Batam dan menjadikan Batam menjadi kota metropolitan, maka harus diperbanyak dan diperluas peluang investasi dengan memberikan kemudahan berinvestasi.

■ Baca **TERCEKIK** ...Hal 2

BP BATAM BARU MEMANGGIL 280 ORANG

2.800 PENGUSAHA KUASAI LAHAN TIDUR

2.800 Pengusaha Kuasai Lahan Tidur

Sambungan dari hal 1

BP Batam, kata Imam, akan terus memantau perkembangannya. Jika tidak berjalan sesuai rencana pembangunan, BP Batam akan kembali memanggil pemilik lahan tersebut.

Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo, beberapa hari lalu dalam Rakerda REI, mengatakan bahwa saat ini memang masih banyak perusahaan yang belum membangun lahan tidurnya. Menurut dia, komitmen membangun lahan tidur ini sangat penting. Sebab banyak calon investor yang kesulitan mendapatkan alokasi lahan sesuai keinginan.

"Banyak investor yang mau masuk. Makanya harus dipastikan keseriusan dari perusahaan untuk membangun

lahannya. Kalau tidak, kita serahkan ke investor yang baru," katanya.

4.000 IPH Belum Selesai

Di sisi lain, BP Batam masih berkutut dengan persoalan penerbitan Izin Peralihan Hak (IPH). Saat ini setidaknya ada 4.000 dokumen IPH yang macet di BP Batam.

"Ini karena masalah yang ada di tahun lalu," kata Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo di Hotel Best Western Panbil, Kamis (12/4).

Ia berharap agar semua pengusaha properti bisa bersabar menunggu penyelesaian IPH tersebut. Ia berjanji akan menyelesaikannya secepat mungkin sehingga ada kemudahan untuk urusan lainnya.

Salah satu terobosan yang dilakukan BP Batam untuk mempercepat IPH ini adalah

penyederhanaan persyaratan. Jika sebelumnya ada 17 syarat mengurus IPH, kini tinggal empat syarat saja.

Tak hanya itu, Lukita juga meminta jajarannya mempercepat proses penerbitan IPH. Selama ini, kata dia, dengan empat persyaratan yang ada, proses pengurusan IPH tetap memakan waktu yang cukup lama, yakni seminggu. "Saya minta staf dibuat menjadi dua atau tiga hari," katanya.

Selain IPH ini, masih ada sekitar 2.000 surat keputusan (SKEP) dan SPJ yang menumpuk di BP Batam. Menurut Lukita, ini juga imbas dari permasalahan yang timbul pada periode pimpinan BP Batam sebelumnya.

"Untuk SKEP SPJ ini juga masih sangat repot. Dalam hal ini juga kami tambah orang

untuk menyelesaikannya. Tetapi karena SDM-nya harus ada keahlian khusus maka akan kami bimbing dulu," katanya.

Untuk penyelesaian SKEP dan SPJ ini juga diharapkan baru bisa selesai tiga bulan ke depan. "Jadi penyederhanaan perizinan IPH itu dan SKEP-SPJ ini baru akan aktif berlaku tiga bulan ke depan," katanya.

Ketua DPD REI Khusus Batam Achyar Arfan mendukung BP Batam untuk segera menyelesaikan IPH tersebut. Tetapi ia berharap agar BP Batam bisa memprioritaskan penerbitan IPH untuk pengembang yang tergabung dalam REI. Alasannya, pemeriksaan berkas lebih mudah dan cepat.

"Jujur, IPH itu sangat membe-ratkan pengusaha kalau tidak cepat-cepat diterbitkan. Tanpa

daging.

Dia pelajari semua itu. Lantas dia tahu banyak peternak kekurangan modal. Sebaliknya dia juga melihat banyak juga orang yang punya uang lebih. Pemilik uang itu sering pula tertipu. Ikut investasi bodong. Maka Dalu, melalui *ternaknesia.com* ingin menjadi jembatan. Dia cari peternak kecil yang ingin maju. Yang tidak bisa maju karena kurang modal. Yang tidak mungkin cari modal ke bank.

Dalu berkesimpulan: tidak mungkin peternak kecil ke bank. Peternak itu tidak punya penghasilan bulanan, apalagi harian. Mereka baru punya pendapatan kalau ternaknya dijual. Berarti setelah 7 bulan kalau kambing. Atau satu tahun kalau sapi. Padahal bank mengharuskan bayar bunga tiap bulan.

Maka lewat *ternaknesia.com* Dalu menggalang dana. Di *ternaknesia.com* dia publikasikan prospektus. Dia tawarkan: siapa ingin investasi di pros-

ke orang lain. Di bidang keuangan Dalu menetapkan syarat keras bersedia memisahkan pembukuan. Harus jelas ma uang rumah tangga dan ma keuangan ternak.

Peternak itu dia kunjung Dia ajak diskusi. Untuk me dapatkan keyakinan agar p nanam modal nanti terhinc dari risiko. *Ternaknesia.co* lantas membuat dokum prospektus. Untuk ditawark ke pemodal lewat aplikasi. S ini Dalu sudah melolosk empat peternak: dari Pacit Bojonegoro, Ponorogo, d Wonogiri. Yang terbesar p Rp 500 juta.

Ternyata empat peter tersebut bisa cepat tertol Untuk yang memerlukan m Rp 500 juta itu misalnya. 146 orang yang mau m namkan modal. Ada j orang pemodal yang me uang di empat peternak. nya dipecah-pecah. Memang usaha Dalu sih sangat permulaan empat peternak. Betu

perkembangannya dituntaskan oleh lembaga antirasuah.

Berdasar putusan Budi Mulya, Boyamin yakin betul bukan hanya satu orang yang seharusnya dipidana dalam kasus *bailout* Bank Century. Sebab, sejak awal KPK menyebutkan bahwa mantan deputi gubernur Bank Indonesia (BI)

It Jadi Cepak

empat bersaudara itu.

Siana ditemukan dokter Ni Wayan Ani Purnamawati setelah Wella secara rutin menjalani terapi mencatat untuk penyembuhannya. "Justru dokter Wayan yang *ngasih* tahu aku kalau ada *alter* lain

itu melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan pihak lain. "Mestinya minimal ada dua orang. Ternyata satu orang," kata dia. Karena itu, dirinya mempertanyakan pihak lain yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.

Di luar praperadilan yang dia ajukan, Boyamin mengakui dirinya juga mencium keanehan lain dalam penanganan kasus *bailout* Bank Century. Menurut dia hanya dua hal yang bisa menghambat proses penegakan hukum.

"Keuangan atau kekuasaan. Kalau keuangan tidak mungkin lah. Berarti kekuasaan," jelasnya. Keterangan itu dia sampaikan bukan sekadar dugaan. Melainkan tuduhan lantaran perkembangan kasus itu lambat.

Sementara itu, Nadia Mulya menyebutkan keluarganya merasa Budi Mulya korban

dalam kasus *bailout* Bank Century.

Lebih dari itu, dia merasa hukuman yang ditimpakan kepada ayahnya tidak adil. Karena itu, Nadia meminta keadilan untuk keluarganya.

"Jadi, kalau mau bilang kasus Century itu tidak bisa hanya Budi Mulya seorang," tegas finalis Puteri Indonesia 2004 tersebut.

Karena itu, dia merasa putusan PN Jaksel terkait kasus yang menjerat ayahnya menjadi momentum bagi KPK menyelesaikan pekerjaan.

"Kalau demi keadilan memang harus ditetapkan tersangka baru, harus ada pengadilan lagi, dan *so be it*," imbuhnya.

Di sela wawancara dengan awak media kemarin, Nadia juga kembali menceritakan pertemuan antara ayahnya dengan Boediono di Lembaga

Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Sukamiskin dua tahun lalu. Dalam pertemuan yang turut disaksikan olehnya, sambung Nadia, Boediono memang tidak banyak bicara.

Selain meminta maaf, mantan wakil presiden itu sempat mengusulkan agar Budi Mulya menggiring opini media.

Juru Bicara (Jubir) KPK Febri Diansyah menjelaskan, instansinya tidak pernah menghentikan penanganan perkara kasus *bailout* Bank Century. Berkaitan dengan putusan praperadilan yang diketuk PN Jaksel, sampai saat ini KPK masih memelajarinya.

Dia pun meyakinkan, instansinya segera menyelesaikan analisis putusan tersebut dan mengambil kesimpulan. "Penanganan perkara kasus *bailout* Bank Century terus berjalan," katanya. (bay/lum/syn/JPG)

Tertibkan 18 Bangunan

Pelebaran Jalan di Baloi Center

LUBUKBAJA (BP) - Penertiban bangunan di tepi ruas jalan kini sudah sampai di Baloi Center, Lubukbaja. Kamis (12/4) kemarin, Tim Terpadu menertibkan 18 bangunan yang berada di atas *Right Of Way* (ROW) di sekitar Simpang Baloi Center, mulai dari Jalan Baloi Taman Kota hingga Jalan Bunga Raya.

Jumlah bangunan yang ditertibkan ada rumah kos dengan total kamar 14 unit. "Totalnya ada 18 bangunan, 12 bangunan sudah dibongkar pemiliknya, tinggal kami bersihkan," kata Kabid Ketenteraman dan Penertiban Umum (Trantibum) Satpol PP Batam Imam Tohari.

Penertiban ini dilakukan guna menjemput rencana pelebaran Jalan Baloi Taman Kota dari Simpang Kampung Nelayan hingga Simpang Baloi

Center. Setelah penertiban kawasan tersebut, pihaknya akan bergeser ke wilayah Sungai Jodoh atau tepatnya Samping BCA. Di lokasi ini ada 33 bangunan yang akan ditertibkan.

"Sebenarnya bulan ini tiga titik, satunya di depan BCS Mall. Tapi lokasi ini yang ditertibkan hanya pagar-pagar saja," terang dia. Sementara itu, Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBM SDA) Kota Batam Yumasnur mengatakan pihaknya akan terus memantau proses pembukaan ruang jalan tersebut.

Pelebaran ruas kini sudah masuk dalam proses lelang. "Jika tidak ada kendala, Mei sudah bisa dikerjakan (pelebaran jalan)," ungkapnya.

Tak hanya di ruas jalan tersebut, beberapa jalan lain yang direncanakan akan dikerjakan Mei mendatang adalah ruas



TIM Terpadu membongkar bangunan yang ada di pinggir jalan di sekitar Simpang Baloi Center, Lubukbaja, Kamis (12/4). Penertiban ini akan dilanjutkan dengan pelebaran ruas jalan di kawasan tersebut.

jalan dari Simpang Harmoni Apartemen menuju Simpang Irinco hingga ke Simpang Polsek Lubukbaja, dan Simpang

Polsek Lubukbaja ke Simpang Baloi Center. Kemudian, ruas jalan dari Simpang Kuda Seipanas ke Simpang Bengkong

Seken.

"Kami tinggal tunggu proses lelangnya saja," pungkasnya. (adi)

F. CECEP MULYANA/BATAM POS

Di... LM... Tiket Sudah Bisa Dipesan

Tercekik Tarif Kontainer

Sambungan dari hal 1

Salah satu caranya adalah dengan menggabungkan Batam dan Bintan dengan jembatan.

Pengurus Kadin Batam, Su-yono mengatakan tarif kontainer ke Batam ini sudah lama dikeluhkan. Tapi hingga saat ini belum ada solusi. Menurutnyanya, tarif yang jauh lebih mahal sudah pasti mengurangi daya saing Batam.

Ia menjelaskan, saat ini tarif kontainer dari Batam ke Singapura dengan ukuran kontainer 40 feet sebesar 700 dolar AS sampai 800 dolar AS. Sedangkan dari Singapura-Jakarta hanya 300 dolar AS sampai 400 dolar AS.

Sedangkan untuk kontainer ukuran 20 feet tarif Singapura-Batam hanya sekitar 300 dolar AS sampai 400 dolar AS. Sementara untuk rute Singapura-Jakarta hanya sekitar 200-300 dolar. "Jadi, tarif ke Batam yang hanya butuh empat jam pelayaran, jauh lebih mahal dibanding ke Jakarta yang bisa sampai 3 hari pelayaran," katanya.

Tak hanya soal tarif kontainer yang mahal, infrastruktur pelabuhan di Batam juga jauh ketinggalan jika dibandingkan dengan daerah lain. Ia mencontohkan *crane* di Pelabuhan Batuampar yang masih jauh dari kata canggih.

"Kalau di Batuampar itu masih manual. Harusnya bongkar

muat bisa dikerjakan 5 menit, tetapi dengan *crane* manual bisa sampai 15-20 menit," katanya.

Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan, mahalnyanya tarif kontainer memang sudah lama dikeluhkan para pengusaha. Tetapi BP Batam tidak fokus untuk menurunkan atau merevisi tarifnya, melainkan memperbaiki dan menambah kapasitas infrastrukturnya.

Menurut Lukita, dengan kapasitas dan fasilitas yang memadai, tarif kontainer dengan sendirinya akan turun atau menyesuaikan. "Otomatis nanti *cost* yang dikeluarkan pengusaha semakin kecil," katanya.

Tahun ini, BP Batam akan memperluas dermaga Pelabuhan Batuampar dengan investasi sebesar 200 juta dolar AS. Begitu juga dengan Bandara Hang Nadim. Tahun ini ada perluasan dan pengembangan bandara dengan anggaran sebesar 400 juta dolar AS.

"Mudah-mudahan di akhir tahun ini atau di awal tahun depan akan kita lelang," katanya.

Batuampar Menunggu Perpres

Sementara itu proses pengembangan Pelabuhan Batuampar akan melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I. Namun,

Pelindo dan BP Batam masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres) untuk mulai mengembangkannya.

"Masih dalam tahap persiapan," kata Direktur Utama Pelindo I Bambang Eka Cahyana di Kabil, Batam, Rabu (11/4).

Eka mengatakan Perpres sangat penting karena menjadi dasar penugasan perusahaan dalam menggarap proyek pengembangan Pelabuhan Batuampar. Kerja sama dengan BP Batam juga dapat berjalan dengan baik dan tanpa hambatan.

"Mengapa memerlukan Perpres? Karena Pelabuhan Batuampar merupakan aset negara sehingga harus mematuhi prosedur yang ada," katanya.

Sedangkan Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan pihaknya berupaya mendorong agar Perpres tersebut segera diterbitkan. "Kami ingin cepat mendapat kepastian agar pengembangan Pelabuhan Batuampar bisa segera digarap," jelasnya.

Saat ini Pelabuhan Batuampar hanya mampu menampung 400 ribu hingga 500 ribu TEUs kontainer. Selain itu, infrastruktur pelabuhan di Batuampar masih minim. Jika pengembangan rampung, kapasitas Pelabuhan Batuampar diproyeksikan akan bertambah menjadi 1,2 juta TEUs. (leo/ian)